

003

MENJAGA AKREDITASI A DI AKPOL MELALUI *HIDDEN CURRICULUM*

Oleh Edy S. Setjo¹

Abstrak

Hubungan antara pendidikan dan kurikulum adalah hubungan antara tujuan dan isi pendidikan. Suatu tujuan baru akan tercapai bila isi pendidikan tepat dan relevan dengan tujuan tersebut. Karena pentingnya peran kurikulum dalam upaya pencapaian pendidikan itulah kemudian banyak orang yang sangat memperhatikan kurikulum. Lembaga pendidikan akan menjaga agar kurikulum yang dimiliki tetap bisa sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Demikian halnya di Akpol. Karena itu, pembaharuan terhadap kurikulum, minimal revisi, selalu dilakukan secara terus-menerus oleh lembaga pendidikan. Proses untuk menjadikan, taruna sebagai lulusan yang profesional dalam bidang kepolisian tidak cukup hanya didasari oleh kurikulum induk yang tertulis sebagai dokumen resmi kelembagaan. Di sinilah posisi pentingnya *hidden curriculum* yang berfungsi sebagai pengantar kurikulum induk agar bisa mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Proses pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan pendidikan dalam lingkup kelembagaan maupun tujuan pendidikan yang bersifat nasional dengan memanfaatkan *hidden curriculum*; membutuhkan tiga aspek, yaitu aspek organisasi, aspek sosial, dan aspek kebudayaan. Aspek organisasi terutama berkaitan dengan pengorganisasian mata kuliah yang ada berkaitan dengan pola pengajaran dan pelatihan; aspek sosial dan aspek kebudayaan berkaitan secara langsung dengan pembentukan sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial. Dalam pelaksanaannya, penerapan *hidden curriculum* di Akpol diikuti oleh hal-hal yang memengaruhinya, baik sebagai faktor pendukung maupun sebagai faktor penghambat. Faktor pendukung yang ada antara lain adanya tata tertib kegiatan, kewajiban komponen pendidikan, sanksi, dan interaksi yang baik antarkomponen. Adapun faktor yang menghambat antara lain terlalu padatnya mata ajar, mata latihan, dan mata asuh; serta adanya keterbatasan pada segenap komponen pendidikan.

Kata Kunci: akreditasi, kurikulum, *hidden curriculum*.

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan

¹) Kombes Pol Drs. Edy S. Setjo, M.M. adalah Direktur Akademik Akademi Kepolisian

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Cita-cita yang terkandung dalam definisi kebudayaan tersebut secara singkat dapat dirangkum menjadi pendidikan pada hakikatnya merupakan upaya “memanusiakan manusia”.

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk Tuhan yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk lain ciptaan-Nya, disebabkan memiliki kemampuan berbahasa dan akal pikiran/ rasio, sehingga manusia mampu mengembangkan dirinya sebagai manusia yang berbeda. Sudjana (1989:2) mengatakan bahwa pendidikan pada dasarnya adalah upaya mengembangkan kemampuan atau potensi individu sehingga bisa hidup optimal baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat serta memiliki nilai-nilai moral dan sosial sebagai pedoman hidupnya. Dengan kata lain, pendidikan bisa disebut sebagai proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, melalui proses yang panjang dan berlangsung sepanjang hayat.

Lembaga pendidikan, yang di dalamnya termasuk Akademi Kepolisian merupakan lembaga formal yang bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana konsep yang dijelaskan oleh undang-undang tersebut. Dalam rangka mewujudkan cita-cita serta tujuan pendidikan, lembaga pendidikan formal merancang dalam jangka panjang sebuah pedoman yang kemudian dikenal dengan istilah kurikulum. Menurut Al-Khouly (dalam Muhaimin dan Mujib 1993 :184) kurikulum adalah seperangkat perencanaan dan media untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Atas dasar definisi tersebut jelaslah bahwa fungsi utama kurikulum adalah sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di

satuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sebagai pedoman, kurikulum memuat rencana dan aturan yang di dalamnya ter-muat tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Akpol sebagai lembaga pendidikan tinggi yang juga bertujuan untuk membawa taruna mencapai tujuan pendidikan nasional telah memiliki kurikulum yang dirancang dan diperbaharui secara terus menerus yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian jelaslah bahwa kurikulum dan proses pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa saling dipisahkan.

Nurgiyantoro (1988:30) menjelaskan bahwa hubungan antara pendidikan dan kurikulum adalah hubungan antara tujuan dan isi pendidikan. Suatu tujuan baru akan tercapai bila isi pendidikan tepat dan relevan dengan tujuan tersebut. Dengan kata lain hanya isi yang tepat atau kurikulum yang sesuai yang akan mengantarkan ke arah tercapainya tujuan pendidikan.

Karena pentingnya peran kurikulum dalam upaya pencapaian pendidikan itulah kemudian banyak orang yang sangat memperhatikan kurikulum. Lembaga pendidikan akan menjaga agar kurikulum yang dimiliki tetap bisa sesuai dengan

perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Demikian halnya di Akpol. Karena itu, pembaharuan terhadap kurikulum, minimal revisi, selalu dilakukan secara terus-menerus oleh lembaga pendidikan. Namun, pemahaman orang terhadap kurikulum kebanyakan hanya terpaku pada bentuk fisik kurikulum, yakni aturan atau pedoman yang tertulis, yang disahkan oleh pimpinan lembaga pendidikan, yang dibuat oleh seluruh warga lembaga pendidikan, dan kemudian diundangkan dan disosialisasikan kepada pihak yang berkepentingan. Di luar kurikulum yang biasanya merupakan dokumen tertulis itu; sebenarnya ada kurikulum lain yang tersembunyi, yang kemudian dikenal oleh orang sebagai *hidden curriculum*.

B. *HIDDEN CURRICULUM*

Menurut Soetopo dan Soemanto (1993:16) kurikulum adalah suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu. Pendidikan dengan demikian merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan. Karena bertujuan inilah maka diperlukan perencanaan yang berupa rancangan program beserta panduan untuk melaksanakannya. Subandijah (1993:2)

menyimpulkan bahwa kurikulum merupakan aktivitas dan kegiatan belajar yang direncanakan, diprogramkan bagi peserta didik di bawah bimbingan lembaga pendidikan, baik di dalam maupun di luar lembaga pendidikan.

Secara operasional kurikulum dapat didefinisikan sebagai bahan tertulis yang berisi uraian tentang program pendidikan suatu lembaga pendidikan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun. Bahan tertulis yang dimaksudkan untuk digunakan oleh seluruh komponen pendidikan untuk melaksanakan proses belajar-mengajar.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 Ayat (2) menyebutkan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Selanjutnya pada Pasal 36 Ayat (3) disebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan (a) peningkatan iman dan takwa; (b) peningkatan akhlak mulia; (c) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; (d) keragaman potensi

daerah dan lingkungan; (e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; (f) tuntutan dunia kerja; (g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (h) agama; (i) dinamika perkembangan global; dan (j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81a Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum telah mengatur bahwa kurikulum setidaknya berisi (1) visi, misi, dan tujuan pendidikan satuan pendidikan, (2) muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, baik yang bersifat nasional maupun kekhasan lembaga pendidikan, (3) beban belajar tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri, (4) pengaturan beban belajar, kalender pendidikan, dan pengaturan waktu libur. Dengan komponen-komponen tersebut sebuah proses belajar-mengajar akan bisa dilaksanakan sehingga proses pencapaian tujuan pendidikan bisa dilaksanakan dengan baik.

Atas syarat kurikulum tersebut, kita pun bisa mengajukan pertanyaan “apakah hanya komponen-komponen itu yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar di lembaga pendidikan?”. Jawabnya tentu tidak. Masih banyak hal yang perlu diatur, dipersiapkan,

dan menjadi pemahaman bersama segenap komponen lembaga pendidikan agar proses belajar-mengajar bisa berjalan sesuai dengan harapan. Hal-hal di luar ketentuan formal kurikulum itulah yang disebut dengan kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*).

Berkaitan dengan *hidden curriculum* McNeil (1990:308) secara lengkap mengatakan sebagai berikut.

The term hidden curriculum refers to unofficial instructional influences, which may either support or weaken the attainment of manifest goals. Hidden curriculum indicates that some of the outcomes of schooling are not formally recognized. (Some curriculum specialists consider unintentional, frequently negative outcomes, an aspect of the hidden curriculum). With few exceptions, the hidden curriculum is portrayed as powerful detrimental force which undermines the professed commitment of schools to intellectual development and a democratic community.

Hidden curriculum menunjuk kepada segala sesuatu yang dapat berpengaruh dalam pendidikan atau lebih khusus dalam proses pembelajaran. Pengaruh ini bisa berupa pengaruh positif, bisa pula berupa pengaruh negatif. Dengan kata lain,

pengaruh itu bisa meningkatkan, mendorong, atau bahkan melemahkan usaha pencapaian tujuan pendidikan. *Hidden curriculum* menunjuk pada praktik dan hasil pendidikan yang tidak diuraikan dalam kurikulum terprogram atau petunjuk kurikulum kebijakan lembaga pendidikan.

Secara lebih terinci, *hidden curriculum* dikatakan sebagai aturan-aturan yang diberlakukan di lembaga pendidikan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang tidak menjadi bagian ketetapan dari Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP). Misalnya, tata tertib berperilaku, seperti tata tertib berpakaian, tata tertib berdialog, tata tertib belajar, maupun peraturan secara tak tertulis tentang bagaimana berkomunikasi dan bersosialisasi antara taruna dan gadik, antara taruna dan pengasuh, antara gadik dan pejabat, dan sebagainya.

Hidden curriculum yang diberlakukan di lembaga pendidikan menjadi salah satu alat untuk mengarahkan dan memberikan pembelajaran moral peserta didik. McNeil (1990: 311) lebih jauh mengatakan sebagai berikut.

The hidden curriculum can be vehicle for moral growth. It can reflect an atmosphere of justice, giving all a chance to share in plan-

ning and executing activities and in gaining the rewards of their accomplishments as part of fair play. This curriculum, more than the formal curriculum, determines to a significant degree the participants sense of self-worth and self-esteem.

Tampaklah di sini bahwa pelaksanaan *hidden curriculum* amat penting dalam upaya pembentukan moral peserta didik, sehingga nantinya bisa dihasilkan peserta didik yang cerdas dan berwawasan serta mempunyai dan mampu menerapkan nilai-nilai moral.

C. ASPEK-ASPEK *HIDDEN CURRICULUM* DI AKPOL

Pelaksanaan *hidden curriculum* dalam pembelajaran di Akademi Kepolisian dapat diketahui melalui tiga aspek, yaitu aspek organisasi, aspek sosial, dan aspek budaya (Musowir 2012:16). Ketiga aspek tersebut bermanfaat untuk mengetahui secara jelas tentang sistem belajar mengajar serta sikap dan tingkah laku taruna dalam mengimplementasikan semua mata kuliah. Aspek organisasi bertujuan untuk mengetahui sistem pengajaran dan tingkah laku taruna di dalam kelas. Aspek sosial bertujuan untuk mengetahui pola hubungan sosial antarkomponen lembaga pendidikan; sedangkan aspek kebudaya-

an bertujuan untuk mengetahui kepatuhan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan program yang telah dicanangkan. Ketiga aspek tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Aspek Organisasi

Aspek organisasi di Akpol yang menonjol antara berkaitan dengan pola yang dipakai, yaitu pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Aspek pengajaran merujuk pada mata kuliah yang ada. Mata kuliah yang diajarkan telah tercantum secara jelas dalam kurikulum induk. Namun, bagaimana mata kuliah itu diajarkan tidak secara eksplisit diatur secara lengkap. Di sinilah peran tenaga pendidik menjadi penting untuk menerapkan *hidden curriculum*. Proses belajar-mengajar yang merupakan aktualisasi mata kuliah di dalam kelas memiliki kekhasan masing-masing, bergantung kepada karakter mata kuliah tersebut dan pendekatan atau model pembelajaran yang digunakan. Masing-masing pendekatan atau model pembelajaran telah membawa proses sendiri-sendiri yang diyakini mampu membawa pembelajaran mata kuliah bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Jumlah SKS antara mata kuliah yang satu dan yang lain bisa berbeda-beda. Pertimbangan banyak sedikit-

nya SKS ditentukan oleh kurikulum induk. Namun secara internal dalam mata kuliah itu diorganisasikan oleh berbagai kepentingan, yang bisa jadi dimulai dari tingkat nasional, regional, lembaga pendidikan, bahkan bisa jadi dari tenaga pendidik yang bersangkutan. Namun, dari semua proses dan kondisi *hidden curriculum* itu bisa berjalan sesuai dengan harapan jika diorganisasi secara baik. Pengorganisasian ini bersifat internal dan eksternal. Pengorganisasian internal berada pada tataran mata kuliah yang bersangkutan, seperti jumlah pertemuan, tugas-tugas terstruktur, dan penilaian. Pengorganisasian eksternal berkaitan dengan bagaimana mata kuliah itu dapat diajarkan, yang dalam hal ini berkaitan dengan ruang dan waktu.

Proses pelatihan yang diarahkan untuk membentuk keterampilan taruna juga membutuhkan aspek organisasi ini. Pelatihan-pelatihan yang tidak terorganisasi tidak akan mampu mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, setidaknya untuk tujuan bersama. Pencapaian tujuan menjadi arah semua mata latihan. Oleh karena banyak mata latihan sementara arahnya sama, maka perlu pengorganisasian yang jelas. Dengan cara demikian proses pelatihan akan berjalan sesuai dengan harapan.

Hal yang sama juga terjadi pada proses pengasuhan, yang utamanya berada di asrama. Out put pengasuhan yang utama adalah membentuk karakter taruna. Dalam visi dan misi Akpol secara garis besar telah dituliskan karakter semacam apa yang dituntut dari taruna. Proses pembentkan karakter yang diinginkan ini lebih banyak dilakukan melalui proses pengasuhan. Di sinilah pentingnya aspek organisasi. Dengan memperhatikan aspek organisasi, maka proses pengasuhan akan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Aspek Sosial

Apple (1979: 87) mengungkapkan bahwa *hidden curriculum* selain digunakan untuk pembentukan norma peserta didik juga difungsikan untuk memberikan peraturan di lembaga pendidikan guna menekan adanya perselisihan atau konflik yang terjadi di lembaga pendidikan. Konflik merupakan masalah sosial. Masalah sosial pada hakikatnya merupakan masalah yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara orang yang satu dan yang lain, antara kelompok yang satu dan yang lain, antara masyarakat yang satu dan yang lain.

Interaksi sosial yang terjadi di lembaga pendidikan dapat diketahui

dengan kedekatan antara peserta didik dan pendidik. Kedekatan tersebut dapat dilihat di dalam kelas maupun di luar kelas yang masih dalam lingkup sekolah. Pola interaksi sosial antara pendidik dan peserta didik, antar pendidik, antarpeserta didik, antara pendidik dan pengelola, dan sebagainya itulah yang menunjukkan bagian *hidden curriculum* dalam bentuk aspek sosiakter yang buruk pula. Di sinilah letak pentingnya aspek sosial. Untuk membentuk karakter taruna sesuai dengan visi dan misi Akpol maka harus diciptaan interaksi sosial yang baik dan sehat.

Salah satu cara yang ditempuh untuk mewujudkan pola interaksi yang sehat itu adalah dengan pemberlakuan *hidden curriculum* dalam aspek sosial yang dilaksanakan dalam menjaga pola interaksi sosial antar-komponen lembaga pendidikan. Aturan-aturan semacam itu, baik yang bersifat tertulis maupun yang tidak tertulis telah banyak dibuat dan dilakukan di Akpol. Terlebih taruna Akpol yang notabene berasal dari berbagai penjuru di Indonesia ini; maka aspek sosial ini menjadi sangat penting kedudukannya. Melalui aspek sosial dalam *hidden curriculum* ini perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan lembaga pendidikan bisa dirajut menjadi hubungan

yang indah dan menyehatkan.

3. Aspek Kebudayaan

Kebudayaan adalah gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu (Koentjaraningrat 1984:9). Dari definisi ini ada dua konsep yang terkandung dalam pengertian kebudayaan, yaitu (1) kebudayaan itu dapat berwujud gagasan, dapat pula berwujud karya dan (2) pemerolehan kebudayaan dilakukan dengan cara belajar.

Dalam konsep yang pertama terkandung pengertian bahwa kebudayaan itu dapat bersifat abstrak – gagasan, nilai, pedoman, dan semacamnya – dapat pula bersifat konkret – hasil budi yang berupa perilaku manusia dan benda-benda sebagai hasil karya manusia. Dalam konsep yang kedua terkandung pengertian bahwa kebudayaan itu diperoleh secara sengaja melalui proses yang terjadi secara turun-temurun dalam sebuah masyarakat. Proses pembelajaran itu terjadi dari generasi tua ke generasi muda. Pihak yang lebih berkepentingan dalam hal ini adalah pihak generasi tua, yaitu mereka merasa berkewajiban untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan yang dimilikinya. Salah satu cara yang tidak dapat dilepaskan

adalah dengan mewariskannya kepada generasi berikutnya. Jika dilihat dari pihak generasi muda, sebagai penerima warisan budaya, konsep pemerolehan budaya dengan cara belajar mengandung pengertian adanya perubahan. Pada hakikatnya proses belajar selalu ditandai dengan adanya perubahan, misalnya dari belum tahu menjadi tahu, dari belum suka menjadi suka, dan sebagainya. Melalui proses pembelajaran inilah generasi muda akan memahami budayanya kemudian akan menyaringnya dalam kehidupan sehari-hari.

Aspek kebudayaan dalam *hidden curriculum* memegang peran penting dalam mewariskan perilaku. Proses pengasuhan yang di Akpol lebih banyak dibentuk dengan adanya sistem asrama, pada hakikatnya merupakan proses pewarisan nilai-nilai atau karakter taruna yang telah digariskan oleh lembaga. Proses pewarisan ini dilakukan dengan interaksi sehari-hari. Di sinilah pentingnya faktor keteladanan. Aspek budaya mengajarkan model interaksi keteladanan ini sehingga karakter dan nilai yang ingin dibangun oleh lembaga pendidikan dapat diwariskan.

D. PELAKSANAAN *HIDDEN CURRICULUM* DI AKPOL

Pelaksanaan *hidden curriculum* di Akademi Kepolisian mempunyai tujuan akhir dalam mendampingi kurikulum induk untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional ini sesungguhnya terbagi menjadi tiga aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Aspek sikap sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual merujuk bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan dan sikap sosial merujuk pada bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain. Kandungan tujuan pendidikan nasional dalam tiga aspek tersebut dapat digambarkan dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1 Kandungan Aspek Tujuan Pendidikan Nasional

No	Aspek	Kandungan
1	Sikap	Spiritual beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
		Sosial berakhlak mulia, sehat, mandiri, demokratis, bertanggung jawab
2	Pengetahuan	berilmu
3	Keterampilan	cakap dan kreatif

Pola pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan memang merupakan satu kesatuan yang secara bersama-sama dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut. Namun, masing-masing pola tersebut sebenarnya memiliki penekanan yang lebih pada salah satu aspek tujuan pendidikan nasional. Pola

pengajaran menekankan pada aspek pengetahuan, pelatihan menekankan pada aspek keterampilan, dan pengasuhan menekankan pada aspek sikap, baik spiritual maupun sosial. Secara lengkap hubungan pola dan aspek tujuan pendidikan tersebut dapat digambarkan dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2 Hubungan Pola Pendidikan di Akpol dan Aspek Tujuan Pendidikan Nasional

No	Aspek Pendidikan Nasional	Pola Pendidikan di Akpol
1	Sikap	Pengasuhan
2	Pengetahuan	Pengajaran
3	Keterampilan	Pelatihan

Penekanan hubungan aspek pendidikan nasional dan pola pendidikan di Akpol ini selain diatur dalam kurikulum inti juga memerlukan *hidden curriculum*. Dengan cara demikian, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang telah ditargetkan oleh lembaga pendidikan Akpol akan benar-benar diwujudkan oleh taruna. Pendekatan dan model pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan akan menunjukkan kurikulum-kurikulum

tersembunyi yang dibutuhkan. Batasan sikap, pengetahuan, dan keterampilan telah ditetapkan dalam kurikulum induk. Namun, bagaimana mencapai sikap, pengetahuan, dan keterampilan tersebut tidak cukup dilakukan hanya berdasarkan kurikulum induk. Di sinilah peran penting *hidden curriculum* di Akpol.

Dalam pelaksanaan *hidden curriculum* tentu ada faktor-faktor yang memengaruhinya, baik faktor pendu-

kung maupun faktor penghambat. Faktor pendukung yang ada antara lain dengan adanya tata tertib kegiatan, kewajiban komponen pendidikan, sanksi, dan interaksi (Musowir 2012:18). Tata tertib sangat bermanfaat sebagai sarana pengatur lalu lintas kehidupan di kampus. Dengan adanya tata tertib masing-masing komponen bisa berjalan di atas rel masing-masing tanpa mengganggu komponen yang lain. Sanksi yang tegas bagi taruna yang tidak mematuhi peraturan akan menjadi alat penjera untuk taruna yang lain sehingga ke depannya lebih baik. Interaksi sosial yang baik antarkomponen pendidikan juga menjadi modal utama dalam menciptakan keserasian, ketenteraman, dan keharmonisan sehingga proses pendidikan bisa berjalan dengan baik. Sarana yang dimiliki oleh Akpol juga menjadi faktor pendukung. Adanya asrama, ruang kuliah, tempat pelatihan, serta sarana-sarana lain akan semakin memperkokoh sikap, pengetahuan, dan keterampilan taruna.

Selain terdapat faktor pendukung, terdapat pula faktor penghambat. Faktor penghambat ini bisa bersifat individual, bisa juga bersifat kelembagaan. Terlalu padatnya mata ajar, mata latih, dan mata asuh menjadikan peroleh sikap, pengata-

huan, dan keterampilan bisa menjadi kurang optimal. Keterbatasan kemampuan fisik dan psikis yang berbeda-beda akan mengakibatkan perolehan komponen tujuan pendidikan juga berbeda. Masih adanya sifat-sifat individual yang kurang terkendali juga menjadi penghambat berjalannya proses pendidikan di Akpol. Contoh yang paling konkret adalah kemampuan taruna melawan rasa kantuk ketika kuliah. Hal ini bukan hanya menghambat perolehan pengetahuan ketika proses belajar mengajar saja, tetapi juga menghambat komponen yang lain.

Kesatuan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan bisa dilihat dari substansi dan prosesnya. Dilihat dari substansi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki taruna berbeda-beda. Ketika berada di Akpol mereka dibentuk untuk bersikap, berpengetahuan, dan berketerampilan minimal yang sama seperti yang tertera dalam kurikulum. Dengan demikian, lulusan Akpol akan memiliki kompetensi yang minimalnya sama. Dilihat dari proses pemerolehan, masing-masing bagian memiliki cara yang berbeda. Meskipun demikian terdapat rambu-rambu yang harus diikuti oleh semua komponen demi terciptanya harmonisasi. Keharmonisan inilah yang

akan mampu menciptakan proses belajar-mengajar di Akpol bisa berjalan dengan baik sehingga tujuan pendidikan, baik yang berlingkup kelembagaan maupun dalam lingkup yang lebih tinggi, yaitu lingkup pendidikan nasional.

E. PENUTUP

1. Simpulan

Kurikulum bagi lembaga pendidikan formal berfungsi sebagai pedoman yang akan menentukan arah ke mana lembaga pendidikan itu akan mengarah. Kurikulum di Akpol diciptakan untuk mengantarkan taruna menjadi lulusan yang profesional. Proses untuk menjadikan taruna sebagai lulusan yang profesional dalam bidang kepolisian tidak cukup hanya didasari oleh kurikulum induk yang tertulis sebagai dokumen resmi kelembagaan. Di sinilah posisi pentingnya *hidden curriculum* yang berfungsi sebagai pengantar kurikulum induk agar bisa mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan.

Proses pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan pendidikan dalam lingkup kelembagaan maupun tujuan pendidikan yang bersifat nasional dengan memanfaatkan *hidden curriculum*; membutuhkan tiga aspek, yaitu aspek organisasi, aspek sosial, dan aspek kebudayaan. Aspek orga-

nisasi terutama berkaitan dengan pengorganisasian mata kuliah yang ada berkaitan dengan pola pengajaran dan pelatihan; aspek sosial dan aspek kebudayaan berkaitan secara langsung dengan pembentukan sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial.

Dalam pelaksanaannya, penerapan *hidden curriculum* di Akpol diikuti oleh hal-hal yang memengaruhinya, baik sebagai faktor pendukung maupun sebagai faktor penghambat. Faktor pendukung yang ada antara lain adanya tata tertib kegiatan yang mengatur segala aktivitas komponen pendidikan yang ada; kewajiban komponen pendidikan yang ada di Akpol, sanksi yang tegas terhadap pelanggar-pelanggar aturan, dan interaksi yang baik antara komponen yang satu dan komponen yang lain. Adapun faktor yang menghambat antara lain terlalu padatnya mata ajar, mata latihan, dan mata asuh menjadikan peroleh sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bisa menjadikan proses penerimaan kurang optimal. Keterbatasan kemampuan fisik dan psikis yang berbeda-beda akan mengakibatkan perolehan komponen tujuan pendidikan yang juga berbeda.

2. Saran

Segeanap komponen yang ada di lembaga pendidikan Akpol ini

hendaknya memahami benar kurikulum, baik kurikulum induk maupun kurikulum yang tersembunyi. Pemahaman ini akan membawa pelaksanaan proses pendidikan di Akpol akan bisa berjalan sesuai dengan arah yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan hakikat kurikulum itu sendiri sebagai pedoman arah pendidikan. Pemahaman terhadap kurikulum ini pula yang akan membawa segenap komponen di lembaga pendidikan Akpol akan bisa memantau sejauh mana kesesuaian kurikulum yang ada dengan tuntutan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pembaharuan terhadap kurikulum dengan demikian akan selalu bisa dilakukan tanpa ha-

rus menunggu kurikulum itu ditinggalkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan.

Proses untuk membawa lembaga pendidikan ke arah selalu sesuai dengan perkembangan zaman ini tidak akan berhasil jika keserasian hubungan antarkomponen pendidikan yang ada di lembaga ini tidak secara bersama-sama mewujudkannya. Dengan demikian, pemaknaan terhadap akreditasi A yang telah diterima oleh Akpol ini hendaknya menjadi perekat segenap komponen yang ada untuk selalu diingatkan bahwa tanggung jawab meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga ini hanya akan terwujud jika didukung oleh semua komponen yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, Zulfikri. 2012. "Pendekatan *Brain Based Learning* dalam Menanamkan Nilai-Nilai Budaya Melalui Pendidikan Formal". Makalah Pusat Kurikulum, Balitbang Diknas.
- Apple, Michael W. 1979. *Ideology and Curriculum*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Barners, Douglas. 1982. *Practical Curriculum Study*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Bellack, Arno A. and Herbert M. Kliebard. 1977. *Curriculum And Evaluation*. California: Mrcutrtan Publishing Corporation.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- McNeil, John D. 1990. *Curriculum A Comprehensive Introduction, Fourth*

- Edition*. London: Scott, foresman/ Little, Brown Higher Education.
- Muhaimin, Abdul dan Mujib. 1995. *Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Filosofik dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya*. Bandung: Trigenda Karya.
- Musowir. 2004. "Hidden Curriculum dalam Pendidikan Agama Islam", *Jurnal Kompetensi* Edisi Oktober 2004.
- Nurgiyantoro, Burhan. 1988. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah Sebuah Pengantar Teoritis dan Pelaksanaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.*
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81a Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum.*
- Subandijah. 1993. *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudjana, Nana. 1989. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*. Bandung: Sinar Baru.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*